



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

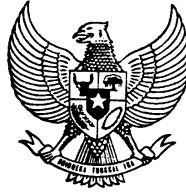
-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 114/PUU-XX/2022**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017  
TENTANG PEMILIHAN UMUM  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR, PRESIDEN, DAN  
PIHAK TERKAIT KPU (IV)**

**J A K A R T A**

**SELASA, 17 JANUARI 2023**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
114/PUU-XX/2022**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Demas Brian Wicaksono
2. Yuwono Pintadi
3. Fahrurrozi
4. Ibnu Rachman Jaya
5. Riyanto
6. Nono Marijono

**ACARA**

Mendengarkan Keterangan DPR, Presiden, dan Pihak Terkait KPU (IV)

**Selasa, 17 Januari 2023, Pukul 11.09 – 11.14 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                          |           |
|--------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman           | (Ketua)   |
| 2) Arief Hidayat         | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams      | (Anggota) |
| 4) Suhartoyo             | (Anggota) |
| 5) Saldi Isra            | (Anggota) |
| 6) Enny Nurbaningsih     | (Anggota) |
| 7) Daniel Yusmic P Foekh | (Anggota) |
| 8) Guntur Hamzah         | (Anggota) |

**Mardian Wibowo**

**Panitera Pengganti**

## **Pihak yang Hadir:**

### **A. Pemohon:**

1. Demas Brian Wicaksono
2. Yuwono Pintadi
3. Fahrurrozi
4. Ibnu Rachman Jaya
5. Riyanto
6. Nono Marijono

### **B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Sururudin
2. Iwan Maftukhan
3. Aditya Setiawan

### **C. Ahli dari Pemohon:**

1. Irmansyah
2. Risnawati Utami

### **D. Pemerintah:**

- |                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| 1. Liestiarini Wulandari       | (Kemenkumham) |
| 2. Purwoko                     | (Kemenkumham) |
| 3. Syahmardan                  | (Kemenkumham) |
| 4. Surdiyanto                  | (Kemenkumham) |
| 5. La Ode Ahmad Pidana Bolombo | (Mendagri)    |
| 6. Raden Gani Muhamad          | (Mendagri)    |
| 7. Wahyu Chandra Purwo Negoro  | (Mendagri)    |
| 8. Puti Dwi Jayanti            | (Mendagri)    |

### **E. DPR:**

1. Bambang Wuryanto
2. Adies Kadir
3. Desmond Junaidi Mahesa
4. Ahmad Sahroni
5. Pangeran Khairul Saleh
6. Arteria Dahlan
7. Supriansa
8. Habiburokhman
9. Taufik Basari
10. N.M. Dipo Nusantara Pua Pua
11. Benny Kabur Harman
12. Aboe Bakar Al Habsy

13. Sarifuddin Sudding
14. Arsul Sani

**F. Pihak Terkait KPU:**

1. Hasyim Asy'ari
2. M. Afifuddin
3. Andi Krisna
4. Mela Indria
5. Tota Pasaribu
6. Fakhrol Huda
7. Sigit Djojowardono

\*Tanda baca dalam risalah:

- [sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.
- ... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).
- (...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 11.09 WIB**

**1. KETUA: ANWAR USMAN [00:14]**

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr, wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.

Pada siang hari ini, sidang lanjutan untuk Perkara Nomor 114 Tahun 2022 dengan agenda Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden serta Keterangan Pihak Terkait KPU. Akan tetapi, kemarin Mahkamah Konstitusi menerima surat dari Dewan Perwakilan Rakyat yang ditandatangani oleh sekretaris jenderal atas nama pimpinan yang pada intinya memohon agar sidang yang semula dilaksanakan secara daring atau online diubah menjadi secara luring atau tatap muka di ruang sidang Mahkamah Konstitusi.

Untuk itu, pada pagi hari tadi Mahkamah Konstitusi di dalam Rapat Permusyawaratan Hakim telah mengabulkan permohonan dari DPR untuk sidang secara luring. Akan tetapi, untuk sidang secara luring tidak bisa dilaksanakan pada hari ini karena Mahkamah Konstitusi harus memberi tahu kepada pihak-pihak lain, yaitu presiden dan Para Pemohon tentunya, termasuk Pihak Terkait KPU, termasuk pula Para Pihak Terkait, ada sekitar 11 yang memohon untuk dijadikan Pihak Terkait. Untuk itu, sekali lagi untuk sidang secara luring atau sidang pada hari ini ditunda pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023, pukul 11.00 WIB.

Sekali lagi, untuk sidang secara luring, tentu Mahkamah Konstitusi akan melakukan beberapa persiapan seperti yang berlaku selama ini, cara mengatur tempat duduk, kemudian pengamanan, dan yang lebih utama adalah memberi tahu kepada pihak-pihak lain, termasuk Pihak Terkait KPU maupun 11 Pihak Terkait yang mengajukan dirinya dan telah disetujui dalam Rapat Permusyawaratan Hakim tadi pagi.

Sekali lagi, sidang untuk hari ini ditunda hari Selasa, 24 Januari 2023, pukul 11.00 WIB, dengan agenda mendengar keterangan DPR, keterangan Presiden, dan Pihak Terkait KPU, sedangkan untuk Pihak Terkait lainnya akan diberi tahu pada sidang yang akan datang.

Untuk diketahui pula bahwa sidang pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023 sekaligus menjadi pertama atau pembuka untuk sidang luring atau tatap muka untuk perkara-perkara lain atau pada sidang-sidang lainnya yang akan datang.

Baik. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 11.14 WIB**

Jakarta, 17 Januari 2023  
Panitera,  
**Muhidin**

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya ( <https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16> ).

